

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan pengaruh mengenai variabel infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Nusa Tenggara Timur. Adapun kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Secara simultan variabel infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilihat dari hasil analisis statistik inferensial yang menunjukkan nilai Adjusted R^2 sebesar 0.819743 dan nilai F hitung sebesar 14.64289 dengan probabilitas 0.003621 yang jauh lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05.
2. Secara parsial variabel infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilihat dari hasil analisis statistik inferensial di atas yang menunjukkan bahwa nilai t-hitung X_1 sebesar 1.995119 yang berarti semakin meningkat infrastruktur jalan maka p PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh juga akan meningkat. Nilai t-hitung X_2 sebesar 1.948886 yang berarti semakin meningkat infrastruktur listrik maka PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh juga akan meningkat. Nilai t-hitung X_3 sebesar 2.168033 yang berarti semakin meningkat Infrastruktur Listrik maka PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh juga akan meningkat.
3. Dari hasil regresi variabel infrastruktur jalan, listrik dan air terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh

Adjusted R² squared sebesar 0.819743. Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 81,97%. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan di luar model estimasi sebesar 18,03 % karena masih ada faktor lain yang mempengaruhi seperti infrastruktur irigasi, infrastuktur sosial dan pertumbuhan ekonomi.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah disarankan untuk dapat merangkul pihak swasta agar dapat bekerja sama dalam membangun infrastruktur yang mendukung perekonomian sehingga dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dalam hal menentukan pembangunan jalan maupun perbaikan jalan di suatu daerah, juga harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Hal ini karena pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, setiap daerah cenderung meningkatkan pembangunan jalan dengan cara menggali potensi daerah guna mengisi besarnya nilai pembangunan tersebut.
3. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang hal tersebut. Misalnya dengan kebijakan penyediaan infrastruktur yang terbukti berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah daerah harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara merata. Ada dua hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas, investasi, dan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki

4. Peneliti berharap, untuk penelitian selanjutnya harus mampu memberikan dan mengembangkan penelitian dan mengembangkan variabel variabel bebas terkait dengan infrastruktur jalan, listrik dan air yang berkaitan dan berpengaruh terhadap PDRB Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, Tio. "Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan ekspor total terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." 2011.
- Agus, Widarjono. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonosia. Jakarta
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Lapangan Usaha 2015-2018*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2011*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2012*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2013*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2014*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2015*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2017*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistik, *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2019*.
- Hasibuan, M. I. ,2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Asahan (Doctoral dissertation, UNIMED)*.
- Hidayat, M. H., dan Nugroho, S. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*.
- Mustika, D., dan Pujiyono, A. 2017. *Pengaruh Infrastruktur Terhadap PDRB Kabupaten Tertinggal di provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal <https://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan->

pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/, diakses Februari 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (<https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses Februari 2020).

Sularno, Fitria Megawati. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat." 2013.

Sulistiawati, Rini. "Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia." *Jurnal ekonomi bisnis dan kewirausahaan* 3.1, 2012, : 29-50.

Suryani, Yosi, dan Rudy Rinaldy. "Perkembangan PDRB Kota Padang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2018." *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 11.2 ,2019: 95-111.

Umiyati, Etik. "Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 9.2, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintahan-pusat-dan-pemerintah-daerah/>, diakses Februari 2020)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-uu-no-33-tahun-2004-tentang-perimbangan-keuangan-antara-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah/>, diakses Mei 2020)